



Khawatir Jadi Temuan

PD Pasar Konsultasikan Penyisihan Cukai di Pasar Tumpah Banyuasri

Singaraja (Bali Post) -

Masih ingat dengan janji Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyerahkan pungutan cukai harian pedagang Pasar Tumpah Terminal Banyuasri, Singaraja untuk Desa Pakraman Banyuasri? Penyesuaian tarif cukai harian itu belum berlaku karena dikhawatirkan menjadi temuan yang berujung permasalahan hukum. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng mengonsultasikan penyesuaian tarif tersebut ke Inspektorat Daerah hingga ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Buleleng Putu Gede Satwikayadnya, di Singaraja, Selasa (27/2) kemarin.

Lebih jauh dikatakan, penyesuaian tarif cukai harian ini karena Bupati telah memutuskan untuk menyerahkan pungutan cukai harian per pedagang per hari Rp 1.000 kepada Desa Pakraman Banyuasri. Penyisihan pungutan itu berimbas akan terjadi kenaikan tarif cukai harian yang dipungut PD Pasar. Penyesuaian ini pun dilakukan lewat Surat Keputusan (SK) Direksi PD Pasar atas persetujuan Badan Pengawas (BP) PD Pasar Buleleng. Sejak penyisihan pungutan retribusi itu disepakati, PD Pasar masih diberikan waktu selama enam bulan melakukan persiapan pemberlakuan tarif cukai harian baru tersebut. "Sekarang ini, baru jalan dua bulan dan kami belum melakukan penyesuaian tarif cukai harian untuk pedagang pasar tumpah di Terminal Banyuasri," katanya.



Bali Post/kmb38

Putu Gede Satwikayadnya

Menurut Satwikayadnya, sisa waktu persiapan empat bulan ke depan ini akan dilakukan dengan mengonsultasikan penyesuaian tersebut kepada instansi yang berwenang seperti Inspektorat

Daerah, BPKP, dan BPK. Ini dilakukan karena dirinya khawatir kalau dalam perjalanannya nanti penyesuaian tarif yang didasari dari maksud baik untuk menyumbang kepada desa pakraman, justru dianggap pelanggaran hukum. Untuk itu, konsultasi ini penting dilakukan sebelum nantinya kebijakan ini mulai dijalankan sesuai janji pemerintah daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, keputusan untuk menyerahkan pungutan cukai harian pedagang di Pasar Tumpah Terminal Banyuasri mencuat beberapa bulan lalu. Pihak Desa Pakraman Banyuasri meminta kepada PD Pasar agar diberikan hak untuk memungut dana sukarela kepada pedagang di pasar tumpah. Sumbangan ini pun dipungut karena Desa Pakra-

man Banyuasri tidak memiliki aset lain yang bisa digunakan menutupi kebutuhan dana pelaksanaan upacara di *wewidangan* desa pakraman.

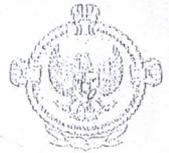
Menyusul permintaan itu, Desember 2017 lalu, pemkab melakukan mediasi dan menyisihkan pungutan cukai harian pedagang pasar tumpah kepada Desa Pakraman Banyuasri Rp 1.000 per pedagang per hari yang kemudian diserahkan secara global.

Menyusul keputusan itu, pungutan cukai harian pedagang di Pasar Tumpah akan disesuaikan. Cukai harian ini baru saja dinaikkan dari Rp 3.000 per pedagang per hari menjadi Rp 5.000. Kenaikan itu karena pedagang di Pasar Tumpah tidak membayar sewa lahan. Cukai harian itu termasuk dana kebersihan, keamanan, pemanfaatan fasilitas umum (fasum), dan PPN 10 persen.

Selain mendapat jatah penyisihan keuntungan dari pengelolaan pasar tumpah, Bupati menjanjikan bantuan hibah senilai Rp 1 miliar untuk pemugaran Pura Segara Camplung yang selama ini kondisinya kurang tertata. (kmb38)

Edisi : Rabu, 28 Feb 2018

Hal : 11



Pembayaran Klaim Pengobatan Pengungsi Tak Jelas

RSU Bangli Berharap Difasilitasi Dinkes Provinsi

Bangli (Bali Post) -

Total klaim biaya pengobatan dan perawatan pengungsi Gunung Agung yang ditanggung Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli mencapai Rp 252 juta lebih. Dari jumlah itu, hanya Rp 88,3 juta yang sudah dibayar. Sementara sisanya masih belum jelas.



Bali Post/kmb40

dr. Wayan Sudiana

Direktur RSU Bangli dr. Wayan Sudiana yang dikonfirmasi, Senin (26/2) kemarin, mengaku belum mengetahui secara pasti siapa yang akan menanggung sisa klaim biaya perawatan pengungsi tersebut. Hanya saja dari informasi yang didapatnya, sisa klaim biaya pengobatan pengungsi itu akan dibayarkan pemerintah pusat. "Infonya masih simpang-siur. Katanya akan diambil alih pusat," terangnya.

Sesuai data dari RSU Bangli, jumlah pengungsi Gunung Agung yang sempat menjalani perawatan di RSU Bangli mencapai 200 orang lebih.

kejelasan terkait siapa pihak yang akan menanggungnya. Mengenai hal itu, pihak RSU Bangli sudah menyampaikan usulan ke Pemerintah Provinsi per tanggal 19 Desember 2017.

Menurut Sudiana jika dibandingkan dengan RSU di kabupaten lain, angka klaim yang masih belum terbayar Rp 130.466.800 di RSU Bangli tergolong kecil. Kondisi itu juga diakuinya belum sampai mengganggu pelayanan di RSU Bangli.

"Kalau di kabupaten lain kan ada yang sampai miliaran. Kalau kita kan tidak terlalu banyak," ujarnya. Meski demikian, pihaknya tetap berharap sisa klaim tersebut segera dibayarkan. Dinas Kesehatan provinsi utamanya agar bisa memfasilitasi ke pemerintah pusat. (kmb40)

Dengan rincian 163 orang pengungsi menjalani perawatan selama 18 September hingga 10 Desember 2017, 30 orang selama 11 Desember hingga 21 Januari 2018 dan 11 orang selama 22 Januari hingga 7 Februari 2018.

Total klaim biaya pengobatan dan perawatan pengungsi Gunung Agung yang harus ditanggung RSU Bangli nilainya mencapai Rp 252.054.700.

Dari total klaim itu, hingga saat ini baru Rp 88.319.000 yang sudah dibayar oleh Satgas Bencana Kabupaten Bangli. Sementara Rp 130.466.800 sisanya sampai sekarang belum terbayar dan belum ada

Edisi : 27 Feb 2018

Hal : 18



Penyidik Pidsus Periksa 23 Saksi

Dugaan "Mark-Up" Anggaran Bupati Cup



Bali Post/kmb35

Made Endra Arianto

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Gianyar masih melakukan pemeriksaan intensif sejumlah saksi yang diduga terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran pada penyelenggaraan turnamen sepak bola Bupati Gianyar Cup 2016. Hingga saat ini, penyidik Pidsus Kejari Gianyar sudah memeriksa 23 saksi. Mereka diminta keterangan di kantor kejaksaan yang beralamat di Jalan Ciung Wanara, Gianyar.

"Saksi sudah banyak. Ada sekitar 23 orang. Mereka semua yang terkait dengan kegiatan itu (Panitia Bupati Cup 2016 - red)," ucap Kasipidsus Kejari Gianyar Made Endra Arianto, Selasa (27/2) kemarin.

Dikatakan, seluruh saksi itu hanya di lingkup panitia penyelenggara lomba. Disinggung soal hasil pemeriksaan, Endra Arianto masih enggan membeber hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. "Belum bisa. Rencananya Minggu depan kita ekspos dulu di internal jaksa. Sehingga diketahui hasil penyelidikan ini sudah layak ditingkatkan atau blum," ucapnya.

Kasipidus Endra Arianto juga belum bisa memastikan ada tidaknya tersangka dalam kasus ini. Ia juga membantah adanya keter-

libatan mantan pejabat tinggi di Pemkab Gianyar dalam perkara ini. "Ini ada panitia khusus. Mereka itu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dananya," sebut dia.

Meski demikian, pihak kejaksaan sedikit membocorkan hasil penyelidikannya, yakni bahwa anggaran yang sifatnya dana hibah dari Pemkab Gianyar ini prosesnya sudah sesuai ketentuan. "Dana hibah pemkab proses sudah dilalui dengan benar. Sesuai Permendagri dan Peraturan Daerah. Jadi, dari birokrat tidak ada penyimpangan, masalahnya di level pelaksana pengguna dana tadi (panitia - red)," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah panitia event ini sudah dipanggil pihak Kejari Gianyar untuk diminta keterangan. Yang

diperiksa panitianya. Panitia Bupati Cup yang diperiksa meliputi seksi perlengkapan hingga seksi pertandingan. Mengenai rincian permasalahan yang melilit PSSI dan panitia, Kasipidsus Endra enggan menjabarkannya. "Kalau bicara masalah, nanti masuk dalam materi penyelidikan kami," terangnya.

Secara terpisah, Ketua PSSI Kabupaten Gianyar Pande Purwata yang dihubungi via telepon belum mau memberi klarifikasi terkait kasus ini. "Nanti saja klarifikasi, biarkan dulu berjalan," ujar Pande singkat.

Turnamen sepak bola Bupati Cup 2016 ini diselenggarakan pada Juli 2016 lalu. Pertandingan diikuti oleh 38 tim sepak bola dari seluruh penjuru Gianyar. (kmb35).

Edisi : 28 Feb 2018

Hal : 5